

CAPACITY BUILDING DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

(Studi Tentang penanganan limbah B3 di Kabupaten Gresik)

ADRIAN DUDI JATNIKA PANDIA

Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga

adriandjpandia@yahoo.com

ABSTRACT

The problem in this research is how is the current condition of capacity building that happen in Natural Environment Office of Gresik Regency in relation with handling of B3 waste in Gresik Regency. This research is considered important because as an institution with authority to handle environmental issues in Gresik Regency given by the local government, Natural Environment Office of Gresik Regency need to have a good ability to handle the problem of B3 waste considering there are many cases of hazardous waste disposal of B3 waste and high estimated amount of B3 waste on local area.

This research used qualitative research method with research strategy of case study type research because it examine the case of capacity building at Gresik Regency Environmental Office as the focus of research. While techniques that was used to collect data are with observation and in-depth interviews with informants. Determination of informants was done by purposive sampling technique with target of three key informants that understood the process of capacity building in research subject the most, because not many people know how the process of capacity building being carried and has sufficient knowledge about it.

The results achieved from this study indicate that the existing capacity building process at the Gresik Regency Environmental Office has several obstacles in the form of lack of field data, few number of personnel and work vehicles, and employees do not have the educational background required by the office. And the office is still react passively to handle B3 waste issues in Gresik regency. Hence the office require further application of capacity building in said lacking areas.

Keywords: Capacity Building, Living Environment, B3 Waste

A. Pendahuluan

Dunia berubah dengan cepat. Kecepatan persebaran globalisasi, inovasi, dan pembangunan mentransformasi pasar namun juga berdampak pada pekerjaan pemerintah, dinamika sosial, dan integritas lingkungan. Lingkungan global berubah, yang semakin kentara dan perlu diperhatikan di masa terakhir-akhir ini. Namun, penanganan masalah lingkungan hidup secara menyeluruh masih terasa sulit karena struktur politik dan proses yang diperlukan masih belum terbentuk secara nyata. Tidak adanya kompetensi yang jelas dan kekuatan politik yang diperlukan mengakibatkan struktur multilevel untuk menangani masalah lingkungan dan

penetapan kebijakan lingkungan yang berhasil masih hanya tahap angan belaka.

Permasalahan lingkungan hidup terlihat lebih kentara di negara berkembang. Pembangunan di negara berkembang memiliki kecenderungan untuk tidak memerhatikan dampak bagi lingkungan sekitar dikarenakan bertumbuh pesatnya pembangunan sebagai dampak modernisasi. Pada satu dekade terakhir ini terdapat peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah yang ada di negara berkembang (negara selain di Eropa, Amerika Utara, Jepang, dan Australasia). Diperkirakan jumlah masyarakat kelas menengah di 17 negara berkembang saja telah menjapai angka satu milyar dengan kombinasi kekuatan beli

sebanding dengan Amerika Serikat, namun milyaran orang masih terjebak kemiskinan dan sangat diragukan transisi menuju kemajuan ala barat dapat berfungsi di populasi manusia yang sekarang mencapai lebih daripada enam setengah miliar mungkin terjadi dengan mempertimbangkan daya dukung planet bumi dan masalah lingkungan yang ada

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, sehingga jumlah industri di Indonesia semakin bertambah. Perkembangan tersebut memberikan konsekuensi terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah yang diakibatkan dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah, termasuk limbah B3 dan limbah non B3. Lebih jauh lagi pencemaran akibat limbah B3 akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Masalah lingkungan hidup yang aktual dihadapi dalam perlindungan lingkungan hidup Indonesia, seperti yang dikatakan Koesnadi Hardjasoemantri, timbul sebagai "*pengaruh sampingan*" dari aktivitas manusia yang berdimensi lingkungan hidup, yang membawa "*perubahan*" besar pada komponen lingkungan hidup, baik fisik maupun sosial budaya, dengan kemungkinan "*risiko*" lingkungan hidup yang timbul dan perubahan tersebut.

Teknologi produksi dan pola konsumsi tumbuh berkembang tanpa memperhitungkan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup, termasuk SDA yang belum memiliki atau belum diketahui manfaatnya, sehingga luput dari perhitungan ekonomi pembangunan. Kemusnahannya tidak dirasakan sebagai suatu kerugian

Sejalan dengan cara pandang tersebut, maka pengelolaan alam tidak disertai upaya pembaharuan. Sampah, kotoran, pencemaran, limbah sebagai hasil kegiatan industri tidak termasuk perhitungan biaya perusahaan, yang kesemuanya itu dibuang secara gratis di muka bumi ini.

Kondisi ini menyebabkan berlangsungnya pembangunan (ekonomi) yang merusak lingkungan hidup (bukan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan). Jadi pembangunan menghasilkan kemajuan (ekonomi) yang disertai dengan degradasi lingkungan hidup (pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup). Fenomena demikian ini bertolak belakang dengan filosofi perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diharapkan, yakni pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup manusia secara sosial budaya yang sekaligus memelihara keseimbangan lingkungan hidup, sehingga tetap mampu mendukung kehidupan umat manusia pada setiap tahap kemajuan yang dicapai secara lintas

generasi. Masalah lingkungan hidup muncul, justru karena diantara pembangunan ekonomi (dalam arti luas) dengan perlindungan lingkungan hidup bukan soal pilihan satu diantara dua. Sekiranya pilihan yang dijadikan dasar, maka masalah lingkungan hidup dalam arti dan pemahaman kekinian menjadi tidak ada, setidaknya tidak menjadi masalah yang penting dalam setiap aktivitas manusia.

Salah satu kabupaten yang memiliki masalah limbah B3 yang relevan dalam pembahasan topik ini adalah Kabupaten Gresik, dan dari data-data yang ada menyiratkan bahwa jumlah limbah B3 di Kabupaten Gresik tergolong tinggi di Provinsi Jawa Timur. Ditahun 2015 sudah berdiri sedikitnya 603 industri besar dan sedang di kota Gresik tersebar di 18 kecamatan. Banyaknya jumlah industri di Gresik berkontribusi terhadap jumlah pencemaran di kabupaten Gresik., untuk data dari Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Jawa Timur 2016, Kabupaten Gresik berada di peringkat tiga sebagai penyumbang limbah B3 di Jawa Timur. Total limbah B3 di Jawa Timur sendiri berjumlah 170 Juta Ton.

Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2015 menyebutkan bahwa Kabupaten Gresik menyumbang prosentase jumlah limbah B3 Provinsi Jawa Timur lebih banyak lagi. tahun 2015 jumlah limbah B3 di Jatim tercatat 19,4 juta ton per tahun atau 1,6 juta ton per bulan, dan limbah B3 yang dihasilkan Kabupaten Gresik mencapai 12.906.054 ton/tahun atau 66 persen dari keseluruhan limbah B3 di Jawa Timur. Data-data lain juga menyebutkan bahwa masalah limbah B3 di Kabupaten Gresik merupakan masalah yang tergolong besar, bahkan sampai pada level provinsi. Ecoton pernah pula membuat laporan bahwa di Gresik sejak 2014 memproduksi limbah B3 lebih dari takaran normal dengan rincian industri cat beban limbah sebesar 194.512 ton per tahun, industri komponen otomotif sebesar 12.906.054 ton per tahun, dan industri makanan minuman sebesar 0,41 ton per tahun. Selain itu, pemerhati lingkungan asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suparto Wijoyo mengatakan, limbah B3 di Gresik dihasilkan dari 1.600 industri. Dari jumlah itu, limbah Kabupaten Gresik mencapai 300 ribu ton, beliau menambahkan bahwa jumlah ini tergolong tertinggi dari daerah Jawa Timur lainnya. Data-data diatas meyakinkan penulis untuk mengangkat masalah limbah B3 di Kabupaten Gresik dengan pertimbangan bahwa jumlah limbah B3 yang ada termasuk tertinggi dibandingkan daerah Jawa Timur lainnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup Kabupaten Gresik. namun, terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik masih

memiliki beberapa kendala dan terkesan tidak serius dalam mencegah pembuangan Limbah B3 secara liar

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik memiliki kewajiban untuk menyelesaikannya agar tidak mengganggu tugasnya. dalam hal ini, penguatan organisasi diperlukan agar tugas organisasi dapat terealisasi dan dapat memperkuat kekuatan organisasi menghadapi masalah-masalah yang menghalangi penunai tugas organisasi, baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Gresik dalam meningkatkan kemampuannya dalam menangani masalahnya adalah dengan melakukan Capacity Building, yaitu sebuah proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi serta sistem untuk memperkuat kemampuan diri, kelompok dan organisasi sehingga mampu mempertahankan diri/profesinya ditengah perubahan yang terjadi secara terus menerus.

Sebagai salah satu organisasi sektor publik, maka penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk melaksanakan apa yang dimaksud dengan *capacity building* atau pengembangan kapasitas tersebut dalam upayanya. Sebagai salah satu organisasi sektor publik yang berupaya memberikan dampak langsung terhadap masyarakat lewat kinerjanya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik diharapkan cukup berdaulat dalam menjalankan tugasnya sebagai pemangku kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Gresik, serta kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik juga mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menjalankan tugasnya. sehingga peneliti berkehendak untuk membuat skripsi berjudul **“CAPACITY BUILDING DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK (Studi Tentang Penanganan Limbah B3 di Kabupaten Gresik)”**

B. Kerangka Teori

Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan beberapa konsep atau batasan lingkungan hidup dan beberapa hal lain yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Lingkungan Hidup adalah (sistem yang merupakan) kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu;
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara

- keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
 14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
 19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
 20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
 21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Kebijakan dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Soemarwoto menjelaskan bahwa manusia membutuhkan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk hidup, saling berinteraksi sehingga mempengaruhi dan dipengaruhi antar satu dan lainnya. Karena itu, menurut Taufiq di perlukan kebijakan lingkungan yang mempunyai sasaran untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SDAdan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.

Menurut Taufiq yang perlu diperhatikan dalam ranah kebijakan untuk keberlanjutan lingkungan yaitu: ditekankannya pengelolaan hutan, air, dan tanah dalam pengelolaan sumber alam, pengelolaan dampak pembangunan terhadap lingkungan, dan pembangunan SDM yang

baik. Karena itu di dalam kebijakan lingkungan dibutuhkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik. Keberhasilannya dicerminkan berdasarkan kemampuan daerah/negara dalam mengelola lingkungan. Mengubah sikap dan kelakuan terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen: pengaturan, pengawasan, ekonomi, dan persuasif.

Pembangunan Kapasitas/Capacity Building

Pendefinisian *Capacity Building* sampai saat ini dimaknai berbeda-beda oleh para ahli. Alasan ini dilatarbelakangi karena *Capacity Building* merupakan konsep yang universal dan memiliki dimensi yang beragam.

Brown mendefinisikan "*Capacity building is a process that increases the ability of persons, organisations or systems to meet its stated purposes and objectives*". Dari pengertian di atas dapat dimaknai bahwa *Capacity Building* adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Capacity Building menurut Yeremias T. Keban lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa *Capacity Building* merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian pada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.

Menurut Morrison *Capacity Building* adalah "suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan, perubahan multilevel didalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Berdasarkan penjelasan tersebut tahapan pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada level individu, organisasi, dan sistem. Pengembangan pada level individu dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan etika individu. Pengembangan pada level organisasi dilakukan pada aspek sumberdaya, ketatalaksanaan, struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan. Sedangkan pada level sistem pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada peraturan perundang dan kebijakan pendukung. Morrison juga menjelaskan *Capacity Building* sebagai sebuah pembelajaran, yakni "*Capacity Building can be seen as a process to induce, or set in motion, multilevel change in individuals, groups, organisations, and system seeking to strengthen the self-adaptive*

capabilities of people and organizations so they can respond to changing environment on an ongoing basis. Capacity Building is multi-level learning process, with links ideas to action. Capacity Building, in this view, can be defined as actionable learning." (*Capacity Building* dapat dilihat sebagai sebuah proses untuk mempengaruhi, atau menggerakkan, perubahan diberbagai tingkatan (multilevel) pada individu, kelompok, organisasi, sehingga mereka dapat merespon perubahan lingkungan yang terjadi terus-menerus. *Capacity Building* adalah suatu proses bukan suatu hasil. Lebih khususnya, *Capacity Building* adalah suatu proses belajar multi-level yang erat kaitannya dengan ide terhadap tindakan. *Capacity Building* dalam pandangan ini dapat diartikan sebagai proses pembelajaran. Berdasarkan pada penjelasan dari para ahli mengenai pengertian dari *Capacity Building* di atas, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *Capacity Building* adalah suatu proses dalam rangka meningkatkan kapasitas berupa peningkatan kemampuan, keterampilan, dan keahlian baik pada level individu, sistem, maupun pada level organisasi. *Capacity Building* terus menerus dilakukan untuk menjaga eksistensi daripada suatu organisasi ataupun pemerintahan untuk terus melayani masyarakat ditengah berkembangnya kebutuhan masyarakat yang terus berubah secara dinamis, maka sangat perlu adanya *Capacity Building* tersebut.

Tingkatan Capacity Building

Walaupun konsep dasar dari *Capacity Building* ini adalah proses pembelajaran, namun pada penerapannya dapat diukur sesuai dengan tingkat pencapaian yang diinginkan, apakah diperuntukkan dalam jangka waktu yang pendek, menengah atau panjang.

Proses *Capacity Building* dalam skop terkecil merupakan proses yang berhubungan dengan pembelajaran dalam diri individu, kemudian pada tingkat kelompok, organisasi dan sistem dimana faktor-faktor tersebut juga difasilitasi oleh faktor eksternal yang merupakan lingkungan pembelajarannya. Dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus maka pengembangan kapasitas memerlukan aktivitas adaptif untuk meningkatkan kapasitas semua stakeholdernya.

Bila kita melihat tentang pendapat para ahli, Grindle mengungkapkan bahwa "*Capacity Building is the combination of strategy directed to improve efficiency, effectiveness from the government performance, with attention focused on these dimensions:*

1. development of the human resource
2. strengthening organizations, and
3. reformation of institution.

Penjelasan Grindle sudah jelas bahwa tingkatan dari Capacity Building terdiri atas: (1) pengembangan sumber daya manusia, (2) penguatan organisasi, dan (3) reformasi kelembagaan. Penjelasan lebih lanjut dari ketiga tingkatan tersebut dikemukakan oleh Keban yang kaitannya dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang professional dan teknis. Kegiatan yang dilakukan antara lain training, pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja dan sistem rekrutmen yang tepat.

Penguatan organisasi masih merujuk pada Keban, yang menjadi pusat perhatian adalah sistem manajemen. Sistem manajemen ini untuk memperbaiki kinerja dalam fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dari struktur mikro. Aktivitas yang harus dilakukan adalah dengan menata sistem insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi, dan struktur manajerial.

Tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan akhir pada level reformasi kelembagaan, perlu perhatian pada perubahan sistem dan institusi-institusi yang ada serta pengaruh struktur makro. Dalam hal ini, aktivitas yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan “aturan main” dari sistem ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan yang dapat mendorong pasar dan berkembangnya masyarakat madani.

Sementara itu, *United Nation Development Programme* (UNDP) mengemukakan bahwa *capacity building* berfokus pada tiga hal, yaitu:

1. tenaga kerja, yaitu pada dimensi sumber daya manusia dan menitikberatkan pada kualitas dan cara SDM dimanfaatkan.
2. modal, terkait dengan dimensi fisik yaitu menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, dan juga tempat atau gedung.
3. teknologi (organisasi dan gaya manajemen), meliputi fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan evaluasi, serta sistem informasi manajemen.

Merujuk pada Riyadi, dikatakan bahwa *United Nation* memusatkan perhatiannya pada mandat atau struktur legal; struktur kelembagaan; pendekatan manajerial; kemampuan organisasional dan teknis; kemampuan fiskal lokal dan kegiatan-kegiatan program. Bila dicermati, semua tingkatan kemampuan atau *capacity building* di atas dikembangkan sebagai sebuah strategi untuk mewujudkan nilai *good governance*. Pendapat di atas bahwa *capacity building* dimaksudkan dapat dilaksanakan pada seluruh lini dari mulai komponen yang terkecil sampai pada komponen

sistem yang tujuan akhirnya menciptakan pemerintahan yang baik.

Mengingat *capacity building* bersifat holistik atau menyeluruh pada semua lini pada suatu organisasi, maka masing-masing tingkatan atau level memiliki perlakuan yang berbeda. Namun tetap esensinya sama mengarah pada pencapaian kualitas yang lebih baik. Dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa *capacity building* memiliki tingkatan berikut:

- A. Tingkatan dan dimensi *capacity building* pada individu.
- B. Tingkatan dan dimensi *capacity building* pada organisasi.
- C. Tingkatan dan dimensi *capacity building* pada sistem

. Bila kita tarik secara sederhana mengenai dimensi atau tingkatan pada *capacity building* ini, yang terdiri mulai dari level individu, organisasi hingga sistem, dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Tingkatan Capacity Building

Tingkatan Sistem	kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan & kebijakan
Tingkatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi, • proses pengambilan keputusan, • prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, • pengaturan sarana dan prasarana, • hubungan-hubungan • jaringan-jaringan organisasi
Tingkatan Individual	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan, • ketrampilan • tingkah laku, • pengelompokan pekerjaan dan • motivasi-motivasi

Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa *capacity building* dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan apabila pada tingkatan individu akan mendapatkan aspek pembelajaran dalam mendapatkan sumber daya yang berkualitas guna terciptanya keterampilan-keterampilan dalam diri individu itu sendiri, akan mendapatkan penambahan pengetahuan dan teknologi, meningkatnya nilai tingkah laku dalam memberi tauladan.

Selanjutnya pada tingkatan organisasi yang berhubungan dengan sumber daya organisasi, budaya organisasi, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan *decision making*. Tingkatan setelahnya adalah pada lingkup sistem, dimana merupakan lingkup tertinggi dalam pembahasan *capacity building* ini. Meliputi kerangka kerja yang berkaitan dengan regulasi, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas.

C. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metodologi yang untuk digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha untuk menjelaskan keadaan pembangunan kapasitas dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan kaitannya dalam penanganan limbah B3 sehingga butuh pemahaman mendalam dalam membaca data penelitian ini sehingga metode kualitatif lebih cocok digunakan. Selain itu, data yang akan diperoleh tidak akan berupa data statistik/diwakili oleh angka, namun berupa pernyataan dan hasil wawancara yang condong mengarah ke penelitian kualitatif.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksploratif karena penelitian ini berusaha untuk mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai proses pembangunan kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan bagaimana kualitas tiga faktor penunjangnya di dinas tersebut, yaitu sektor individual, organisasional, dan sistem. Tipe eksploratif ini memberikan informasi-informasi berupa wawancara langsung dengan instansi yang ditarget, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik mengenai upaya pembangunan kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam menangani permasalahan limbah B3 di Kabupaten Gresik.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Gresik dan akan difokuskan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku pemangku kebijakan penanganan limbah dan sasaran pembangunan kapasitas. Lokasi diatas dipilih sebab Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang memiliki jumlah Limbah B3 yang amat besar ,bahkan menurut data merupakan kabupaten penyumbang Limbah B3 terbesar di Jawa Timur. Pengaduan pembuangan Limbah B3 secara liar masih merupakan jenis pengaduan yang dominan di pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Selain itu, pada Dinas Lingkungan Hidup dipilih karena di didalamnya berdiam pelaku-pelaku yang menjadi sasaran pembangunan kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan karena berkaitan langsung dengan proses penanganan limbah B3 di Kabupaten Gresik.

Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan purposive sampling dengan snowball sampling, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan

menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai. Analisis data dilakukan dengan menguji, mengkategorikan ataupun mengkombinasikan kembali bukti - bukti untuk menunjuk pijakan awal penelitian dan menetapkan serangkaian keterkaitan timbal balik mengenai permasalahan penelitian tersebut.

Adapun ciri-ciri yang dicari dari informan untuk penelitian ini adalah:

1. Mereka mengetahui proses pembangunan kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam kaitannya dengan penanganan limbah B3 di Kabupaten Gresik.
2. Mereka sedang berkecimpung atau terlibat dalam proses pembangunan kapasitasnya..
3. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.
4. Mereka objektif dalam penyampaian informasinya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, atas dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data diatas digunakan dalam penelitian ini.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data , penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin - menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam

bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut analisis.

D.Pembahasan

Kondisi *Capacity Building* di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Dalam membangun kapasitas internal guna menguatkan organisasi dalam menghadapi masalah Limbah B3 di Kabupaten Gresik, tentunya Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya.. Kendala yang ada dibedakan menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala external.

Untuk kendala internal berasal dari jumlah pegawai yang kurang, dimana hanya terdapat 11 orang yang menangani masalah limbah B3 dari sekitar 1.100-1.200 perusahaan. dan dari 11 pegawai itu, baru 5 yang menjadi PNS . Dengan sedikitnya jumlah personil itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mengalami kesulitan dalam hal melakukan tindakan penanganan limbah B3 karena 1 pegawai bisa harus menangani lebih dari 100 perusahaan. Selain itu pegawai yang ada terkadang tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan guna melakukan tindakan pengecekan limbah B3. Hal ini disebabkan baru sedikit anggota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang benar-benar memiliki latar belakang pendidikan dari lingkungan hidup. Dari seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang ditemui selama penelitian, hanya Ibu Adiana Setiawati yang murni berpendidikan Lingkungan Hidup. selebihnya merupakan pindahan dari dinas lain yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan Lingkungan Hidup.

Selain pegawai, permasalahan internal lain dalam penanganan limbah B3 adalah kurangnya sarana-prasarana berupa kendaraan operasional guna melakukan kegiatan verifikasi hasil limbah, sehingga pegawai sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan survei ke perusahaan-perusahaan penghasil limbah. Selain itu, faktor anggaran juga merupakan kendala dikarenakan jumlah anggaran yang didapat dari APBD tidak mencakupi dari anggaran dana yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, sehingga beberapa pos anggaran yang seharusnya dilakukan, dananya dialihkan ke pos lain yang dirasa dibutuhkan.

Untuk kendala eksternal adalah banyaknya jumlah perusahaan yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang mencapai 1.100-1.200 perusahaan. Lalu banyak perusahaan yang belum melakukan pelaporan hasil limbah B3 dan beberapa perusahaan yang belum

muruti kaidah pengelolaan limbah B3 yang baik. Perusahaan penghasil limbah juga terkadang mengalami ketidaksesuaian jenis limbah yang diproduksi dengan yang ada di dokumen pengaturan limbah B3.

Namun apabila dilihat dari aspek pengetahuan pegawai mengenai Tupoksi masing-masing, motivasi pegawai, struktur organisasi, prosedur pengambilan keputusan, mekanisme kerja, dan pembuatan Rencana Strategis dalam pekerjaannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dirasa telah melakukan upaya yang baik dalam mempersiapkannya. Pegawai telah diberi motivasi yang baik dalam menjalankan tugasnya, struktur organisasi tertata dengan baik, dan terdapat rencana kegiatan yang telah disusun dengan baik oleh organisasi, terbukti dari adanya Rencana Strategis dan Rencana Jangka Panjang yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Berbagai kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tidak membuat dinas merasa terhalang dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan rencana kerja dinas pada tahun 2018 untuk melakukan sosialisasi dengan 40 pelaku usaha dan inventarisasi jumlah limbah B3 dari 30 perusahaan, sekalipun dengan keterbatasan yang telah disebutkan Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses *Capacity Building* di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam menangani limbah B3 di Kabupaten Gresik sudah terlaksana dengan baik di aspek-aspek dimana Dinas Lingkungan Hidup berhak dalam pengaturannya, sementara permasalahan yang ada yang ada berasal dari aspek-aspek yang tidak dapat Dinas Lingkungan Hidup kontrol.

Tingkatan Level *Capacity Building* di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Tingkatan Individual

1. Pengetahuan

Aspek pengetahuan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sudah terbangun sampai tahap tertentu. Psudah mengetahui tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai karena sudah diatura dalam Tupoksi pegawai. Pegawai paham bagaimana tata cara penanganan laporan pembuangan limbah B3 secara liar dan mampu mengenali pembuang limbah berdasarkan jenis limbah B3 yang dibuang. namun pengetahuan tentang banyaknya jumlah limbah B3 masih kurang karena database limbah B3 yang ada belum representatif dengan keadaan yang ada, yaitu hanya berasal dari data dari 20-30% perusahaan di

Kabupaten Gresik yang telah mengumpulkan data limbah B3.

2.Keterampilan

Keterampilan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dirasa sudah cukup dalam menangani permasalahan sehari-hari, dikarenakan fungsi sehari-hari pegawai telah diatur dalam Tupoksi pegawai. Namun dalam sisi teknis, pegawai dengan latar belakang pendidikan bukan lingkungan hidup mengalami kewalahan. Hal ini dikarenakan pegawai tidak harus memiliki lingkungan hidup dan penanganannya sebagai latar belakang pendidikan untuk dapat bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

Oleh karena itu, dilakukan pelatihan untuk membiasakan pegawai dengan tuntutan kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Namun frekuensi latihan jarang dilakukan karena pelatihan masih berasal dari pusat dan tidak terdapat pemberitahuan kepada dinas dalam pelaksanaannya. dinas juga harus mendaftar terlebih dahulu untuk pelatihan dikarenakan terdapatnya kuota sehingga memakan waktu lama menyebabkan proses yang lama. hal ini menyebabkan pegawai lebih sering melakukan pembelajaran keterampilan lewat pegawai yang lebih senior.

3.Tingkah Laku

Tingkah laku dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang ada sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak ada masalah dengan tingkah laku. Indikatornya adalah tidak adanya aduan mengenai tingkah laku pegawai dinas yang buruk dan adanya ketentuan tingkah laku yang sudah disepakati bersama.

4. Pengelompokan Kerja

pengelompokan kerja Dinas Lingkungan Hidup belum sesuai dengan latar belakang lingkungan hidup yang dibutuhkan oleh dinas. Sehingga ketika tiba pada permasalahan teknis, pegawai kewalahan karena tidak memiliki latar belakang kompetensi lingkungan hidup. Namun BKD sudah melakukan substitusi dengan memberi pegawai kepada dinas dengan kompetensi yang mirip dan dirasa dapat ditarik pararelnya dengan lingkungan hidup. beberapa pegawai yang ada di dinas merupakan pindahan dari dinas-dinas lainnya sehingga butuh waktu untuk pembiasaan diri. Kritik disini adalah bahwa pegawai yang sudah melatih dirinya terhadap satu dinas tertentu seharusnya tidak dipindah ke dinas baru, yang

akhirnya menyia-nyiakan pelatihan pegawai tersebut.

5. Motivasi

Motivasi bagi pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang telah diberikan adalah tauladan atasan untuk datang tepat waktu serta pelibatan pegawai dalam rapat umum guna meningkatkan apresiasi diri dan pengetahuan pegawai sehingga pegawai termotivasi. Terdapat pula tunjangan-tunjangan berbasis kinerja dan kedisiplinan pegawai yang membuat pegawai terpacu untuk memperbaiki diri. Hasil dari motivasi ini sangat tergantung dengan individu pegawainya, dimana kebanyakan termotivasi, sementara lainnya kurang.

Tingkatan Organisasi

1. Struktur Organisasi

Untuk penanganan limbah B3 di Kabupaten Gresik, bagian yang ada pada struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk penanganan limbah B3 sudah jelas, yaitu berasal dari Bidang PPKLH sebagai koordinator B3 dan limbah B3. Sebab bagian PPKLH adalah bagian yang berwenang melakukan pemantauan dan pengawasan limbah B3. Namun pengambilan keputusan pada akhirnya tetap pada Kepala Dinas selaku pimpinan organisasi

2. Proses Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mempertimbangkan berita acara yang menjelaskan masalah dan aturan-aturan yang melandasi proses pengambilan keputusan. Pengambil keputusan dinas adalah pihak kepala dinas daripada dinas-dinas terkait, ditambah dengan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari staf. Untuk level intenal bidang, kepala bidang dapat mengambil keputusannya sendiri tanpa berdiskusi dengan kepala dinas terlebih dahulu, mempercepat proses pengambilan keputusan.

3. Prosedur dan Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja dalam penanganan limbah B3 yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sudah terdapat dalam prosedur yang sudah dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan pihak-pihak penghasil limbah B3 telah diberi sosialisasi untuk mengerti alur mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik ketika mendapatkan laporan pembuangan limbah B3 telah dibuat ringkas mungkin sehingga jeda

antara pelaporan dan tindak lanjut tidak terlalu lama. Kendala mekanisme kerja ada pada jumlah anggaran dan SDM yang belum memadai, serta skill pegawai yang kurang memadai.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tergolong kurang bagi pegawai. Sarana dan prasarana yang dinilai kurang adalah pada sumber anggaran, kendaraan operasional dan lokasi bangunan fisik, dimana jumlah anggaran yang ada belum mencukupi kegiatan dinas, jumlah kendaraan operasional hanya berupa satu mobil dan dua motor, dan kondisi gedung dinas yang perlu perbaikan. Namun pegawai dapat mengatasi keterbatasan sarana dengan menggunakan aset pribadi sebagai pengganti sarana dan prasarana yang kurang tersebut.

Tingkatan Sistem

5. Kerangka Kerja yang Berhubungan Dengan Aturan dan Kebijakan

Untuk sistem penanganan masalah limbah B3 sudah dibentuk di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dengan jelas. Sistem tersebut berasal dari Renstra (Rencana Strategis) dan dibuat untuk menjadi acuan dalam penanganan permasalahan lingkungan hidup secara umum, sehingga tidak spesifik hanya limbah B3 namun sudah mencakupi. Fungsi umum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah melakukan pengawasan terhadap ketaatan perusahaan dalam menghasilkan dan mengolah limbah B3 yang ada, pemantauan akan adanya pembuangan limbah B3 yang tidak diatur di lingkungan, serta merespon adanya laporan pembuangan limbah B3 oleh masyarakat lewat berbagai media. Hanya saja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup terbagi dalam hal apakah kebijakan yang ada sudah cukup dalam menangani permasalahan limbah B3 yang ada, terlihat dari masih banyaknya laporan-laporan pembuangan limbah B3 ilegal.

Proses pembuatan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup sendiri melibatkan banyak pihak, tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup sendiri, namun juga Bupati selaku pemimpin daerah, Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah dan BKKAD selaku pengatur anggaran. Dinas Lingkungan Hidup juga telah memperkaya tindakan yang diambil dalam mengatasi limbah B3 secara preventif, yaitu melalui nota kesepahaman antar perusahaan pemroduksi limbah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, dan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan.

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, kondisi *Capacity Building* di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan pegawai dalam organisasi sudah cukup untuk level sehari-hari. Namun ketika berurusan dengan urusan teknis, pegawai kewalahan dikarenakan jarang ada pegawai dengan latar belakang pendidikan lingkungan hidup. Pegawai dapat tahu mengenai tugas pokok fungsinya lewat peraturan daerah yang sudah mengatur tupoksi pegawai dan aturannya harus ditaati. Banyak pegawai yang tidak berketerampilan lingkungan hidup ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sehingga pengetahuan pegawai soal jumlah limbah B3 sendiri masih terbatas. Namun, pegawai sudah paham mengenai tata cara penanganan kasus pembuangan limbah karena sudah diatur dalam tupoksi masing-masing.

2. Keterampilan

Keterampilan pegawai yang ada masih tergantung penempatan pegawai di dinas yang diatur oleh Badan Kepegawaian Daerah, sehingga, perlu proses pembiasaan diri dengan tantangan organisasi. Pembiasaan tersebut dilakukan lewat pelatihan dan workshop yang dilaksanakan oleh baik dinas maupun kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Namun frekuensinya terbatas dikarenakan keterbatasan dana dinas sendiri.

3. Tingkah Laku

Tingkah laku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik telah diatur lewat prosedur dan perintah pimpinan. Pegawai harus membawa tugas dinas sebagai pelayan masyarakat dan tingkah lakunya harus sesuai dengan aspek melayani tersebut. Aturan tersebut terbilang ketat di beberapa sisi, seperti larangan menerima sugahan dalam bentuk apapun ketika melaksanakan sidak ke perusahaan penghasil limbah. Hasilnya tingkah laku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tidak memiliki masalah.

4. Pengelompokan Kerja

Sekalipun kebanyakan pegawai belum memiliki latar belakang pendidikan lingkungan hidup, pengelompokan kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terbilang lumayan cocok. Dikarenakan pegawai yang ditempatkan setidaknya memiliki paralel pengetahuan dengan lingkungan

hidup serta pegawai sudah punya pengalaman menangani di dinas lainya.

5.Motivasi

Motivasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sudah terpacu dengan adanya tauladan atasan untuk tepat waktu, pengikutan pegawai pada rapat utama, dan pemberian tunjangan berbasis kinerja dan kedisiplinan. Umpan balik dari pegawai sendiri terbilang cukup baik dengan kebanyakan pegawai merespon positif motivasi tersebut.

Tingkatan Organisasi

1.Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sudah berubah dari badan menjadi dinas pada tahun 2017. Hal ini mempermudah tugas organisasi dikarenakan beban tugas yang tadinya dipegang oleh satu Kasi (kepala seksi) sekarang disebar ke tiga pegawai dengan rentang jabatan yang sama. Struktur organisasi tersebut diubah untuk menjawab tantangan masalah lingkungan hidup di Kabupaten Gresik serta diperiksa secara berkala oleh BPK. Untuk penanganan masalah limbah B3 sendiri ditangani oleh bagaian PPKLH (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup).

2.Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dimulai dengan adanya laporan masalah atau kegiatan yang hendak dilakukan, kemudian kepala dinas yang bersangkutan, dengan masukan dari staff, mengambil keputusan atas nama dinas. Namun untuk pengambilan keputusan pada level bidang, kepala bidang dapat mengambil keputusan tanpa berkonsultasi pada kepala dinas lebih dahulu.

3.Prosedur Dan Mekanisme Kerja

Prosedur dan mekanisme kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dibuat seringkasan mungkin agar dinas bisa segera menindaklanjuti laporan temuan limbah B3 di wilayah. Prosedur penanganan limbah B3 sendiri sudah diatur di PP 101 tahun 2014. Kendala mekanisme kerja yang ditemui biasanya terletak pada anggaran dinas, jumlah pegawai, kualifikasi pegawai, dan banyaknya perusahaan yang dipantau.

4.Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada belum cukup mengakomodasi pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk mengadakan pengawasan limbah B3 di Kabupaten

Gresik. Sarana dan prasarana yang dianggap kurang adalah kendaraan operasional, anggaran, serta bangunan fisik. Solusi atas keterbatasan ini adalah pegawai menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan verifikasi, anggaran yang ada diarahkan ke pos-pos yang dianggap penting, dan pembenahan bangunan fisik dinas sendiri.

Tingkatan Sistem

A.Kerangka kerja yang Berhubungan Dengan Aturan dan Kebijakan

Kerangka kerja yang ada telah dibentuk untuk menjawab permasalahan yang tengah muncul sebagai fokus dinas. Kerangka kerja tersebut disusun dalam Renstra (Rencana Strategis) organisasi dalam periode waktu 5 (lima) tahun. Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam pengendalian limbah B3 juga melibatkan pihak ketiga sebagai pengelola limbah B3, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik masih tetap melaksanakan fungsi pengawasan terhadap baik perusahaan maupun pihak ketiga guna mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuangan limbah B3.

Kebijakan yang telah dibentuk terasa kurang bagi beberapa pegawai, dikarenakan masih terdapat banyak laporan illegal dumping limbah B3 di wilayah Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, perbaikan demi perbaikan terus dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar dapat benar-benar mengurangi jumlah limbah B3 yang ada. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik juga melakukan tindakan-tindakan seperti pertemuan antar stakeholder, kerja sama dengan para stakeholder dan institusi pendidikan, serta sosialisasi dengan pelaku usaha guna mengurangi limbah B3 yang dihasilkan.

Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai pembangunan kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk menangani masalah limbah B3, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pada aspek Individual, dinas memperbaiki proses rekrutmen pegawai agar dinas dapat memiliki pegawai dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dinas
2. Pada aspek Organisasional, dinas menambah sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas dan gedung untuk mempermudah proses penanganan laporan pembuangan limbah B3,
3. Pada Aspek Sistem, perlu dibuat kebijakan-kebijakan yang dapat efektif

untuk menjaga agar pembuangan limbah B3 secara liar dapat diatur, dan penyelesaian database limbah B3 sebagai acuan dalam membuat kebijakan.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Brown, Lisanne *et.al*, 2001, *Measuring Capacity Building*, Carolina Population Centre/University of North Carolina, Chapel Hill.

Idowu, Samuel and Céline Louche. 2011. *Theory and Practice of CSR: A concise view*. London: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada..

Hardjosoemantri, Koesnadi. 1999, *Hukum Tata Lingkungan Edisi Kedelapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,.

Hidayat., 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta

Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta

Milen A. 2006. *Capacity Building: Meningkatkan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka

Mitchell, T. R. 1997. *Research in Organizational Behavior*. Greenwich, CT: JAI Press,

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari dan M. Martini Nawawi. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Rida, Gandara, 2008. *Capacity Building Dosen Pada Jurusan di Perguruan Tinggi Dinas Hukum Milik Negara*. UPI Bandung.

Riyadi, Selamat. 2006. *Banking Assets and Liability Management*. Edisi Ketiga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta

Saul, J.R. 2005. *The collapse of globalism and The reinvention of the world*. New York: The Overlook Press.

Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga

Soemarwoto, O. 1983. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Djambatan. Jakarta.

Soeprapto, Riyadi. 2006. *“The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance”*. World Bank.

Tenence, Morrison. 2001. *“Actionable Learning – A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning”*, ADB Institute.

Jurnal

Mutiarin, Dyah. 2012. *Transformasi Birokrasi : Dari Proses Pembelajaran Organisasi Menuju Perkuatan Kelembagaan*. Jurnal FISIPOL Univ. Muhammadiyah. Yogyakarta.

Taufiq, Muchammad. 2011. *Kedudukan dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal WIGA. Vol. 2 No.2 September 2011

Yeremias T. Keban. 1999. *“Capacity Building” sebagai prasyarat dan Langkah Strategis bagi Perwujudan Otonomi Daerah di Indonesia*. JKAP. Volume 3 No. 2. November 1999

_____. - 2000. *“Good Governance” dan “Capacity Building” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*.

Website

Anonim, *BBTPPI Ajak Industri di Gresik Cegah Pencemaran Lingkungan, begini Caranya*. (<http://surabaya.tribunnews.com/2017/11/01/bbtppi-ajak-industri-di-gresik-cegah-pencemaran-lingkungan-begini-caranya>) diakses tanggal 3 November 2017.

Anonim, 2018, *Pabrik di Gresik ini Diduga Buang Limbah Cair Tergolong B3, Ini Kata LSM FPSR* (<https://faktanusantara.com/pabrik-di-gresik-ini-diduga-buang-limbah-cair->

tergolong-b3-ini-kata-lsm-fpsr/) diakses tanggal 24 april 2018

Anwar,Mujib,2016. *Posko Ijo : Industri Gresik Penyumbang Terbesar Limbah Berbahaya*. (<http://surabaya.tribunnews.com/2016/01/07/p-osko-ijo-industri-gresik-penyumbang-terbesar-limbah-berbahaya>). Diakses tanggal 27 april 2016

Della,2017, 7.300 Ton Limbah B3 Diduga Masuk Melalui Pelabuhan Maspion Gresik,(<http://beritatrans.com/2017/02/23/7-300-ton-limbah-b3-diduga-masuk-melalui-pelabuhan-maspion-gresik/>). diakses tanggal 24 april 2018

Reno,2017, *DLH Gresik Gagal Bangun TPA*,(<http://www.siagaindonesia.com/162241/DLH-gresik-gagal-bangun-tpa.html>), Diakses tanggal 26 September 2017.

Riski,Petrus,2016, *Ancaman Lingkungan Itu Limbah B3*, (<http://www.mongabay.co.id/2016/01/08/ancaman-lingkungan-itu-limbah-b3/>),diakses tanggal 10 april 2016.

Wahyudianto,Aries,2017, PT Paci Siap Bersihkan Limbah,(<https://www.jawapos.com/radarsurabaya/read/2017/08/18/8301/pt-paci-siap-bersihkan-limbah>), Diakses tanggal 26 September 2017.